

## KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PAKEM

### STATUS BULAN OKTOBER 2009

Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja pembukuan PAKEM status Oktober 2009 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Propinsi	Kota/Kab.	Σ Pakem Existing (MIS)	Hasil Penilaian			Total ( Existing Identified)	Keterangan
				SB	M	TM		
1	N.A.D.	Kab. Gayo lues	34			34	34	
2		Kota Langsa	36			36	36	
3		Kota Lhokseumawe	28			28	28	
4		Kota Sabang	17				17	Proses Pembentukan Pakem
5	Sumatera Utara	Kab. Asahan	14			14	14	
6		Kab. Dairi	9			9	9	
7		Kab. Labuhan Batu	9			9	9	
8		Kota Padang Sidempuan	13	13			13	
9	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	24			24	24	
10		Kab. Pesisir Selatan	6			6	6	
11		Kab. Solok	7	7			7	
12		Kota Padang	8			8	8	
13		Kota Sawah Lunto	15			15	15	
14		Kota Sijunjung	7			7	7	
15	Bengkulu	Kab. Kaur	4				4	Baru Pencairan dana dan Faskel Ekonomi Blm Dilatih
16	Lampung	Kab. Lampung Utara	10				10	Proses Pemberkasan Proposal
17	Bangka Belitung	Kab. Belitung	9				9	Proses Pemberkasan Proposal
18		Kab. Belitung Timur	5				5	Proses Pemberkasan Proposal
19	Jawa Barat	Kab. Garut	45			42	45	
20		Kab. Sukabumi	7	7			7	
21		Kab. Bogor	10				10	Tahap Pembentukan PAKEM
22		Kab. Cirebon	16	2	12	2	16	
23		Kab. Indramayu	5			5	5	
24		Kab. Karawang	11		11		11	
25		Kota Bandung	44			44	44	
26		Kota Bekasi	19			16	19	
27		Kota Bogor	19	19			19	
28		Kota Cimahi	27			27	27	
29		Kota Cirebon	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
30		Kota Depok	10			10	10	
31	Jawa Tengah	Kab. Banyumas						Proses Pencairan Dana (APBD)
32		Kab. Boyolali	65			65	65	
33		Kab. Grobogan	22				22	Proses Pemberkasan Proposal
34		Kab. Karanganyar	45	45			45	
35		Kab. Kebumen	97	97			97	
36		Kab. Magelang	44			44	44	
37		Kab. Purbalingga	9		9		9	
38		Kab. Sragen	32	32			32	
39		Kab. Sukoharjo	33				33	Proses Pemberkasan Proposal
40		Kab. Wonogiri	48		36		48	

No	Propinsi	Kota/Kab.	Σ Pakem Existing (MIS)	Hasil Penilaian			Total ( Existing Identified)	Keterangan
				SB	M	TM		
41		Kab. Brebes	29				29	Pembukaan Rek PAKEM
42		Kab. Demak	27				27	Proses Pemberkasan Proposal
43		Kab. Kendal	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
44		Kab. Pekalongan	37		37		37	
45		Kab. Pemalang	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
46		Kab. Semarang	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
47		Kab. Tegal	30	10	19	1	30	
48		Kota Pekalongan	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
49		Kota Semarang	Tidak Lanjut					Keg. PAKET tidak dilanjutkan
50		Kota Tegal	25		12		25	
51	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	46	2	43		46	
52		Kab. Gunung Kidul	31	2	29		31	
53		Kab. Kulon Progo	34		34		34	
54		Kab. Sleman	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
55	Jawa Timur	Kab. Jombang	36			36	36	
56		Kab. Lumajang	24			24	24	
57		Kab. Pamekasan	36	23		13	36	
58		Kab. Sumenep	38			38	38	
59		Kab. Tulungagung	79		53		79	
60		Kab. Banyuwangi	45				45	Proses Pemberkasan Proposal
61		Kab. Bondowoso	24				24	Proses Pemberkasan Proposal
62		Kab. Gresik	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
63		Kab. Lamongan	53	1	22	30	53	
64		Kab. Malang						Proses Pemberkasan Proposal
65		Kab. Mojokerto	59			59	59	
66		Kab. Pasuruan	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
67		Kab. Situbondo	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
68		Kota Batu						Menunggu Pencairan Dana
69		Kota Malang	Selesai					Kegiatan PAKET selesai
70		Kota Pasuruan						Menunggu Pencairan Dana
71	Banten	Kab. Lebak	13				13	Kegiatan PAKET tahap2 sudah selesai .Sekarang sedang proses PAKET thap 3
72		Kab. Pandeglang	64				64	Kegiatan PAKET tahap 2 sudah selesai .Sekarang sedang proses PAKET tahap 3
73		Kab. Serang	26			26	26	
74		Kab. Tangerang	38				38	Porses Pencairan Dana Tahap 3
75		Kota Cilegon	12	3	9		12	
76	NTB	Kab. Bima	19			19	19	
77		Kab. Lombok Barat	23	1	5	17	23	
78		Kab. Lombok Tengah	21	20	1		21	
79		Kab. Lombok Timur	39			39	39	
80		Kab. Sumbawa	11			11	11	
81		Kota Bima	7				7	Proses Pembukaan Rek Pakem
82		Kota Mataram	25	25			25	
83	Kalimantan-Bar	Kab. Bengkayang	32		32		32	
84		Kab. Ketapang	5	5			5	
85		Kab. Landak	26		17	9	26	
86		Kota Pontianak	1	1			1	

No	Propinsi	Kota/Kab.	Σ Pakem Existing (MIS)	Hasil Penilaian			Total ( Existing Identified)	Keterangan
				SB	M	TM		
87	Kalimantan-Teng	Kota Palangkaraya	0					Proses Pemberkasan Proposal
88	Kalimantan-Sel	Kab. Barito Kuala	10			10	10	
89		Kab. Hulu Sungai Selatan	15			15	15	
90		Kab. Tabalong	30			30	30	
91		Kab. Tanah Laut	44			44	44	
92		Kota Banjarmasin	11			11	11	
93	Kalimantan-Tim	Kab. Kutai Kartanegara	18			18	18	
94		Kab. Pasir	15			15	15	
95	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	40		16	24	40	
96	Sulawesi-Teng	Kota Palu	35			35	35	
97	Sulawesi-Sel	Kab. Bantaeng	26			26	26	
98		Kab. Bone	34			34	34	
99		Kab. Bulukumba	32			32	32	
100		Kab. Enrekang	25			25	25	
101		Kab. Gowa	24			24	24	
102		Kab. Jeneponto	31			31	31	
103		Kab. Luwu Utara	33			33	33	
104		Kab. Selayar	18			18	18	
105		Kab. Sidenreng Rappang	34			34	34	
106		Kab. Takalar	17			17	17	
107		Kab. Tana Toraja	22			22	22	
108	Sulawesi-Tra	Kab. Bombana	29	18	10	1	29	
109		Kab. Buton	32	31	1		32	
110		Kab. Kolaka Utara	25	25			25	
111		Kab. Konawe	32	28		4	32	
112		Kab. Muna	18	18			18	
113		Kota Baubau	26			26	26	
114		Kota Kendari	41	41			41	
115	Gorontalo	Kota Gorontalo	40			40	40	
116	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	13			13	13	
117		Kab. Polewali Mandar	17			17	17	
			2665	476	408	1366	2.665	

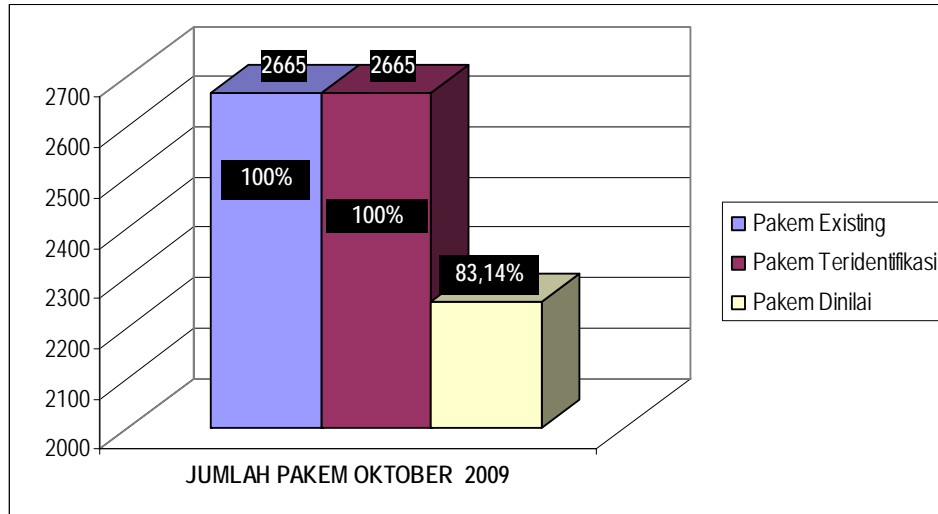
Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja Pembukaan Panitia Kemitraan status Oktober 2009 yang dikirim Askot MK

### PAKEM Eksisting, Teridentifikasi dan Yang Telah Melaksanakan Pembukaan

Bulan Oktober 2009 terdapat 2.665 PAKEM eksisting, tidak termasuk sejumlah PAKEM yang telah menyelesaikan kegiatan PAKET tahap 1, 2 dan 3 seperti di Kota/Kab. Malang, Situbondo, Gresik, Sleman, Pekalongan, Cirebon, Pemalang, Kendal, Pasuruan dan Kab. Semarang. Selain itu juga tidak termasuk sejumlah PAKEM yang tidak melanjutkan kegiatan PAKET (dihentikan) di Kota Semarang. Dari 2.665, sebanyak 2.665(100%) PAKEM telah teridentifikasi statusnya.

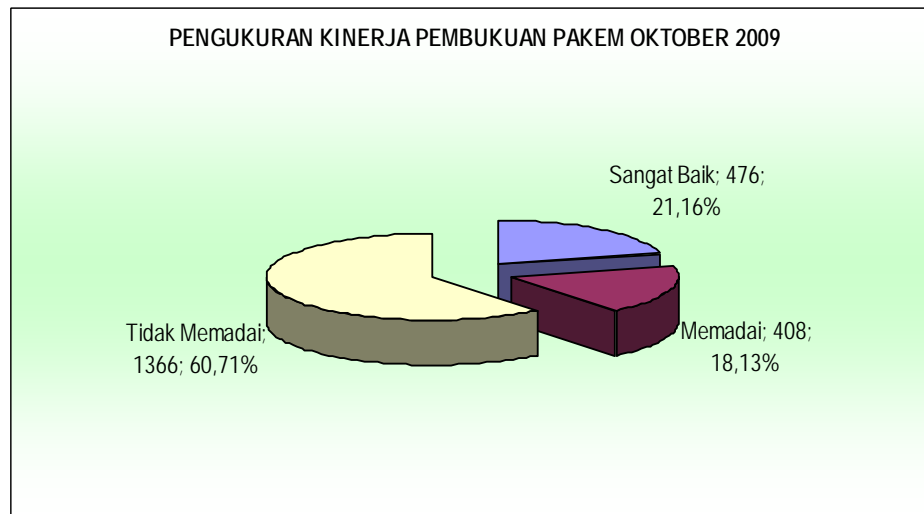
Dari 2.665 PAKEM yang telah teridentifikasi, sebanyak 2.250 (83,14%) sudah melaksanakan pembukaan PAKEM. Sedangkan sisanya 415 PAKEM teridentifikasi sebagai: dalam proses penyusunan proposal, proses Pembentukan PAKEM, Proses Pembentukan POKJA, proses pembukaan rekening PAKEM.

Perbandingan jumlah PAKEM eksisting, teridentifikasi dan telah melaksanakan pembukuan tergambar sebagaimana diagram berikut:



### Kinerja Pembukuan

Dari 2.250 PAKEM yang telah melaksanakan pembukuan (terukur), terbagi dalam 3 kategori capaian kinerja: 476 (21,16%) Sangat Baik, 408 (18,13%) Memadai, dan 1366 (60,71%) Tidak Memadai. Proporsi ketiga capaian kinerja dapat dilihat pada *pie chart* berikut:



Kinerja Tidak Memadai bukan indikasi kondisi pembukuan yang buruk, melainkan misalnya, karena belum dilaksanakan audit independen, yang kemudian dinilai 0 (nol). Pada beberapa kota / kabupaten belum dilaksanakan audit karena memang sedang berjalan kegiatan PAKET. Sementara audit dilaksanakan setelah kegiatan diselesaikan per tahap.

Aspek pengukuran lain adalah pemanfaatan dana dilaksanakan sesuai per termin. Pada sejumlah PAKEM dinilai 0 pada aspek ini karena dorongan masyarakat untuk segera melaksanakan kegiatan sementara dana APBD maupun APBN belum cair. Pelaksanaan suatu kegiatan yang dirasa sebagai kebutuhan yang mendesak atau vital, seperti saluran air bersih, pembangunan jembatan yang tidak bisa tertunda menunggu pencairan dana sesuai termin, menghindari datangnya musim hujan atas pelaksanaan kegiatan infrastruktur, dll.

Aspek pengukuran lain adalah dana kas tunai di bendahara PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta. Pada kebanyakan PAKEM dinilai 0 karena kesulitan mendapatkan tandatangan Kepala Dinas sebagai salah satu specimen tandatangan untuk mencairkan dana di rekening bank atas nama lembaga PAKEM, minimal 3 specimen tandatangan. Dengan demikian, seringkali PAKEM menarik seluruh dana di bank, yang mengakibatkan bendahara memegang kas tunai lebih dari Rp 1 juta dalam batas toleransi waktu 2 x 24 jam.

Aspek pengukuran lain adalah sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana BLM PAKET. Pada kota/kabupaten yang sharing program menilai aspek ini menjadi 0 (nol). Padahal pada pelatihan ascot MK telah ditekankan bahwa aspek tersebut di luar kemampuan jajaran konsultan, maka seharusnya dilaporkan ke KMP sebagai 1 (satu), dan diisi 0 untuk dikomunikasikan kepada PAKEM guna mendorong POKJA / PEMDA sharing in cash.

Aspek pengukuran lain adalah specimen tandatangan rekening pakem minimal 3 orang, yang terdiri atas unsur dinas, anggota BKM dan kelompok peduli. Pada beberapa kota/kabupaten terlanjur hanya memiliki 2 specimen tandatangan, sesuai SOP yang diterapkan sebelumnya yang telah 'dimodifikasi / sikap permisif' TA MK KMW setempat, pada umumnya tanpa specimen unsur kelompok peduli (*Data Lebih Lengkap terkait dengan sebaran Item indikator Penilaian Kinerja Pembukuan Pakem dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan 2*).

Adapun analisa dan kajian data pada aspek pengukuran kinerja terhadap pembukuan PAKEM adalah sebagai berikut (*data pada lampiran 2*) :

#### **A. Aspek Kebijakan Keuangan**

Pada aspek kebijakan keuangan dalam pengukuran kinerja pembukuan pakem terdiri dari 4 item pengukuran, yaitu :

1. Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket. Merupakan kebijakan sharing dana PAKET yang terdiri dari besar dana yang bersumber dari APBD (In Cash atau Nilai sharing Program) dan sumber lain (kelompok peduli) minimal 50% dari total Dana PAKET. Pada item indikator pengukuran ini secara keseluruhan menunjukkan dari 2250 pakem yang masuk dalam pelaporan terdapat 2117 pakem (94,09%) yang jawabannya 1 ini, hal ini menunjukkan bahwa terpenuhinya 50% sharing dana dari APBD + swadaya dan kelompok peduli lainnya dari total dana PAKET sedangkan sisanya 133 pakem (5,91%), ini dikarenakan tidak diketahuinya nilai sharing program yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. 133 Pakem ini tersebar di 4 Propinsi (Jawa barat 97 pakem, Jawa Timur 16 Pakem, NTB 11 Pakem dan Kalimantan Barat 9 Pakem)

2. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui  
Realisasi penggunaan dana dari APBD dilihat dari Laporan penggunaan dana APBD oleh Pokja dan realisasi dana penggunaan BLM PAKET dilihat dari laporan PAKEM disertai pembukuan dan bukti transaksinya.  
Pada item indikator ini secara keseluruhan yang memenuhi item indikator sebanyak 2026 Pakem (94,04%) dari 2250 yang dinilai. Sedangkan sisanya sebanyak 224 pakem (9,96%) belum diketahui sehingga dinilai 0, karena LPJ belum diselesaikan dan masih terdapatnya kegiatan yang sedang berproses.
3. Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"  
Pada item indikator pelaksanaan audit, dari 2250 pakem yang dilaporkan (dinilai) terdapat 1128 (50,13%) yang sudah dan proses melakukan audit, sedangkan sisanya sebanyak 1122 pakem (49,87%) belum dilakukan audit terhadap pakem karena memang kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (belum selesai).
4. Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin  
Sesuai dengan kebijakan program PAKET bahwa pemanfaatan dana PAKET dilakukan dalam 3 termin dalam setiap tahapan (termin 1 dari APBD, termin ke 2 dan termin 3 dana BLM PAKET pemanfaatan dan penarikan dana paket disesuaikan dengan kebutuhan).  
Pada item indikator ini secara keseluruhan/nasional terdapat 2168 (96,36%) Pakem yang sesuai dengan proses pelaksanaan termin sisanya 82 pakem (3,64%) dari 2250 pakem yang terukur blm melakukan sesuai dengan koridor yang ditetapkan karena dari beberapa pakem tersebut baru dicairkan ke rekening pakem dan belum sempat mencairkan untuk pelaksanaan kegiatan.

## **B. Aspek Sistem Pembukuan**

Pada aspek Sistem Pembukuan terdapat 5 item indikator (indikator 5 sampai dengan 9), yaitu :

5. Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem pembukuan PAKEM P2KP  
Sebanyak 2209 pakem (98,18%) dari 2250 pakem terukur telah memenuhi sistem pembukuan PAKEM P2KP, dan sisanya sebanyak 41 pakem (1,82%) belum memenuhi sistem pembukuan PAKEM P2KP. 41 Pakem tersebar 3 Propinsi (NTB 19 Pakem, Kalimantan Timur 18 Pakem dan 4 Pakem di Sulawesi Tenggara.) dilihat data yang masuk 41 Pakem ini baru selesai pembukaan ke rekening Pakem sehingga proses pembukuan belum digunakan sepenuhnya.
6. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi  
Sebanyak 2019 pakem (89,73%) sudah memenuhi sedangkan sisanya sebanyak 231 pakem (10,27%) belum memenuhi. Belum terpenuhinya item indikator ini karena sering terdapat transaksi yang pencatatannya ditunda-tunda (tidak dicatat pada saat/hari itu juga) sehingga sering kali bukti bukti jadi terselip dan lupa, beberapa pakem juga terlihat bahwa dana baru cair sampai di rekening pakem sehingga belum ada pencatatan transaksi detail pemanfaatan uang BLM sehingga nilai dari pengukuran masih 0 (buku-buku bantu belum digunakan).

7. Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi  
Sebanyak 2246 pakem (99,82%) rekening menggunakan Nama PAKEM. Dan sisanya 4 pakem belum (0,18%).
8. Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli  
Sebanyak 2158 pakem (95,91%) sudah memenuhi sisanya 92 pakem (4,09%) belum memenuhi dikarenakan hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan BKM.
9. Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta  
Sebanyak 1935 pakem (86,00%) sudah memenuhi dan sisanya sebanyak 315 pakem (14,00%) belum terpenuhi.

### C. Aspek Pelaporan Dan Monitoring

Pada aspek Sistem Pembukuan terdapat 2 item indikator (indikator 10 dan 11), yaitu :

10. Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai  
Sebanyak 1069 pakem (47,51%) sudah memenuhi dan sisanya sebanyak 1181 pakem (52,49%) belum memenuhi.
11. Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai  
Sebanyak 1004 pakem (44,62%) sudah memenuhi dan 1246 pakem (55,38%) belum memenuhi.

### Analisa Faktor Lemahnya Pembukuan :

1. **Kajian terhadap Kebijakan Keuangan**, pada aspek pengukuran yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pembukuan dari hasil penilaian tersebut ditemukan kelemahan-kelemahan pembukuan pada 1 aspek pengukuran yaitu belum terpenuhinya "Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian". Pada item indikator pelaksanaan audit yang belum terpenuhi sebanyak 1122 pakem (49,87%) belum dilakukan audit terhadap pakem karena memang kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (belum selesai).
2. **Kajian terhadap aspek Sistem Pembukuan**, pada aspek pengukuran yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dari hasil penilaian tersebut ditemukan kelemahan-kelemahan pembukuan pada butir item ke 6 : "Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi". Terdapat 231 pakem (10,27%) yang belum memenuhi indikator ini, adapun penyebabnya adalah bahwa sering terdapat transaksi yang pencatatannya ditunda tunda (tidak dicatat pada saat/hari itu juga) sehingga sering kali bukti bukti jadi terselip dan lupa, beberapa pakem juga terlihat bahwa dana baru cair sampai di rekening pakem sehingga belum ada pencatatan transaksi detail pemanfaatan uang BLM sehingga nilai dari pengukuran masih 0.
3. **Kajian terhadap aspek Pelaporan dan Monitoring**, pada aspek pengukuran yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dari hasil penilaian tersebut ditemukan kelemahan-kelemahan pembukuan pada butir item ke 10 dan 11. Butir 10 dan 11 cukup

berkaitan sehingga memang kelemahan-kelemahan itu akan terjadi juga di butir 11. seperti diketahui bahwa pada :

- Item 10 “Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai”, sebanyak 1181 pakem (52,49%) dari 2250 pakem yang terukur belum memenuhi, ini disebabkan LPJ masih dalam proses, juga adanya pelaksanaan pekerjaan yang sedang dan baru selesai dilaksanakan.
- Item 11 “Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai”, sebanyak 1246 pakem (55,38%) dari 2250 pakem yang terukur belum memenuhi, ini disebabkan LPJ masih dalam proses, juga adanya pelaksanaan pekerjaan yang sedang dan baru selesai dilaksanakan.

### Progres Laporan Pengukuran Kinerja Pembukuan PAKEM

Berdasarkan rekapitulasi laporan hasil pengukuran kinerja pengelolaan keuangan PAKEM bahwa selama enam bulan terakhir (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober) menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah laporan yang dikirim ke KMP. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Kriteria Penilaian	Periode Tahun 2009 (Bulan)								
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
Sangat Baik	76	80	78	21	233	443	476		
Memadai	149	133	237	387	705	333	408		
Tidak Memadai	11	40	142	327	1092	1311	1366		
<b>Total Pakem Dinilai</b>	<b>236</b>	<b>253</b>	<b>457</b>	<b>735</b>	<b>2030</b>	<b>2087</b>	<b>2250</b>		

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja PAKEM Oktober 2009

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa kategori kinerja tidak mendefinisikan kualitas pembukuan, melainkan karena adanya aspek pengukuran yang belum dipenuhi seperti pelaksanaan audit yang belum waktunya, specimen tandatangan tidak ada unsur kelompok peduli, dst (*lihat dalam Lampiran 1 dan 2*).

